

BAPENDA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

SOP PAJAK DAERAH I

TAHUN 2024



JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

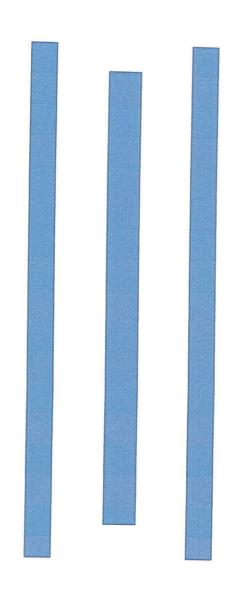
BATAM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB Pajak daerah i

NOMOR: \$509 / 000.8.3.3 / VI / 2034



Dibuat oleh Direviu oleh	Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP
Bidang Pajak Daerah I	Bidang Pajak Daerah I	Kepala Bapenda Kota Batam



No. SOP	: 5500 / 000. 8.3.3/VI/2029
Tanggal Pembuatan	: (24 Juni 2024
Tanggal Revisi	: 03 Oktober 2024
Tanggal Pengesahan	: 09 Oktober 2024
Disahkan oleh	
	1

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 400

ĺ		NIP. 19701120 200003 1009
	Nama SOP	: PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB
		PAJAK DAERAH I
Dasar Hu	ıkum :	
		Kualifikasi Pelaksanan
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1 Minimal SLTA/Diploma/Strata
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5	Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	
Keterkaita	an:	Peralatan/Perlengkapan :
1	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	1 Laporan Wajib Pajak
2	SOP Pelaporan	2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3	Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi	3 Komputer
eringatar	n:	4 Printer
	Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-	5 Jaringan Internet
	The state of the s	o damigan miernet

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	ODA
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	4



PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM Tanggal Pengesahan : 0 Oktober 2024 Disahkan oleh

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSKAH

NIP. 19701120 200003 1009
PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB Nama SOP

1500	Dasar Huku	ım Pelayanan/Kegiatan								
	1									
	2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dar	Pemerintahan Daerah							
		The state of the s								
1.	3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah								
	4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
	5	Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan								
	6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uralan Tugas dan Pendapatan Daerah Kota Batam	dan Sistem Keria di Lingkun							
	Pihak-pihak	yang terlibat	,							
	1	Kepala Badan								
2.	2	Sekretariat								
	3	Bidang								
	4	Wajib Pajak								
	Tahapan Pel	ayanan / Kegiatan								
	No	Tahapan Proses Pelayanan / Keglatan								
	ECCAPACION SERVICES		Waktu							
	1	Monitoring penerbitan SKPDKB atas SSPD BPHTB, Keterlambatan pelaporan PPJB/atau akta atas tanah dan/atau bangunan, denda atas pelanggaran pajak Jika	Setiap hari kerja							
	2	Setelah 30 hari kalender saat terutangnya pajak (atas SKPDKB) Setelah 20 hari kalender setelah waktu maksimal pelaporan PPJB/atau akta atas tanah/atau bangunan Masih dalam masa 5 tahun sejak pelanggaran atas Pelaksanaan Perda pajak belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan	1 hari							
	3	3 Pengiriman Surat Pemberitahuan								
	4	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	1 hari Setiap hari kerja							
	5	Jika Tidak membayar maka di teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak daerah I untuk di nonaktifkan user validasi BPHTB sementara	5 Menit							
	6	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak daerah I dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	15 Menit							
3.	7	Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan pajak daerah I	15 Menit							
	8	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja							
	9	Jika Tidak, setelah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama	15 Menit							
	10	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja							
	11	Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua	15 Menit							
	12	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja							
	13	Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah I di wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa								
	14	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja							
	15	Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa	10 Menit							

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	9
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	*

1	No. Transport relatify China and									
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM		Halaman: 1/2							
			PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB PAJAK DAERAH I							
				Pelaksa	na			Mutu Bak		T
No	Ordian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Keberatan	JFU Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete- rangan
1.	Monitoring penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT atas SSPD BPHTB, Keterlambatan pelaporan PPJB/atau akta atas tanah dan/atau bangunan, denda atas pelanggaran pajak Jika						Database Pembayaran Pajal daerah I	Setiap har	Laporan Pembayaran Pajak daerah I	
2.	1. Setelah 30 hari kalender saat terutangnya pajak (atas SKPDKB) 2. Setelah 20 hari kalender setelah waktu maksimal pelaporan PPJB/atau akta atas tanah/atau bangunan 3. Masih dalam masa 5 tahun sejak pelanggaran atas Pelaksanaan Perda pajak belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan	-	Ya				Daftar Sasaran Surat Pemberitahuan Pajak daerah I	1 hari	Draft Surat Pemberitahuan	
3.	Pengiriman Surat Pemberitahuan	ightharpoonup					Surat Pemberiitahuan	1 hari	Tanda Terima Surat	
4.	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	***					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak daerah I	
5.	Jika Tidak membayar maka di teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak daerah I untuk di nonaktifkan user validasi BPHTB sementara			\Diamond			Foto Dokumentasi Objek Pajak	5 Menit	Tanda Terima Penyerahan Dokumen	
6	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak daerah I dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan						Laporan Hasil Pemeriksaan/STPD	15 Menit	Draft Surat Ketetapan Pajak daerah I	
7	Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan pajak daerah I	SP Ya	\rightarrow			F	- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Pemberitahuan	15 Menit	Tanda Terima Surat Pemberitahuan	
8	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	***************************************	Tidak			S	OP Pembayaran		Realisasi Pajak daerah I	
9	Jika Tidak , setelah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama,	Ya	\rightarrow			Si	urat Teguran atau urat Peringatan ertama	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran/Peringa tan Pertama	

1000			-									
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM		No. Tanggal efektif: Oktober 2024							Halaman: 2/2		
8			PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB							Halama		
		PAJAK DAERAH I										
					Pelaksai	1a			Mutu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Penagi Pemei	Bidang han dan riksaan Paerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	JFU Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete- rangan	
10	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran			Tidak				SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak daerah I		
11	Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua	2	~	>				Surat Teguran atau Surat Peringatan Kedua	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran/Peringa tan Kedua		
12	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Ya Ya		Tidak				SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak daerah I		
13	setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah I di wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa	Ya		>				Pemasangan spanduk, stiker maupun iklan di media massa	15 Menit	Bukti Poto Dokumentasi Pemasangan spanduk, stiker maupun iklan di media massa		
14	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	3	L		Tiba	sk .		SOP Pembayaran		Realisasi Pajak daerah I		
15	Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa							Berita acara dan delengkapan data		Berita Acara Serah Terima		

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	97
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	7

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM KOTA BATAM

> RAJA AZMANSYAH NIP, 19701120 200003 1 009



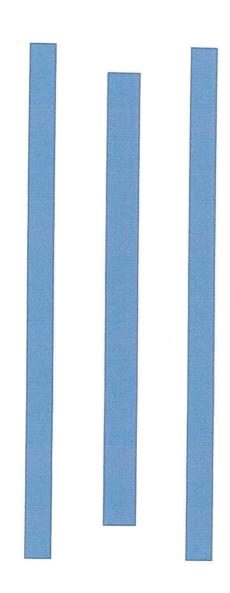
JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673 **BATAM**

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB Bidang Pajak Daerah I

NOMOR: \$510/0.0.0.8.3.3/V1/2029



Dibuat oleh	Direviu oleh Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP
Bidang Pajak Daerah I	Bidang Pajak Daerah I	Kepala Bapenda Kota Batam



No. SOP	: 5510 / 000 . 8.3.3/41 / 2024	
Tanggal Pembuatan	: 04 Juni 2024	
Tanggal Revisi	: 07 Oktober 2024	***************************************
Tanggal Pengesahan	: 09 Oktober 2024	
Disahkan oleh	:	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009

		NIP. 19701120 200003 1009
	Nama SOP	: PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB
		BIDANG PAJAK DAERAH I
Dasar Huk	dim :	DIDATO I ADAR DAERAH I
- and man		Kualifikasi Pelaksanan
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1 Minimal SLTA/Diploma/Strata
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	3 Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5	Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan :
1	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	1 Laporan Wajib Pajak
2	SOP Pelaporan	2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3	Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi	3 Komputer
Peringatan		4 Printer
	Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-	5 Jaringan Internet

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I	
HARRY DERMAWAN, SE, MM	7
Kasubbid Penagihan dan	-
Pemeriksaan	R
NOFRIALDY, S.IP	



No. SOP : \$510 (000 . 8 . 3 . 3 / 1 (2024

Tanggal Pembuatan : 04 Juni 2024

Tanggal Pengesahan : 05 Oktober 2024

Tanggal Pengesahan : 05 Oktober 2024

Disahkan oleh : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

BAD	PEMERIN AN PENDAPA	TAH KOTA BATAM TAN DAERAH KOTA BATAM		RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009							
			Nama SOP	PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB BIDANG PAJAK DAERAH I							
	Dasar Huku	m Pelayanan/Kegiatan									
	1										
	2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Palak Daerah dan Retribusi Daerah									
1.	3	Peraturan Menteri Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah								
	4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
	5	Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan									
	6 Dibak nihak	Badan Pendapatan Daerah K yang terlibat	mor 27 Tahun 2023 ota Batam	Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uralan Tugas dan S	Sistem Kerja di Lingkungan						
	1	Kepala Badan									
2.	2	Sekretariat									
	3	Bidang									
	4	Wajib Pajak									
		layanan / Kegiatan									
		- January									
	No	Tahapan Proses Pelayanan /			Waktu						
	1	Surat Perintah Tugas dan Surat Pajak	1 Hari								
	2	Berkas Surat Setoran Pajak Dae	Setiap Hari Kerja								
	3	Inventarisir Pemanggilan Wajib	1 Hari								
	4	Pengiriman surat pemanggilan o	1 Hari								
	5	Wajib Pajak hadir di Kantor BAD Pemeriksaan Kantor	1 Hari								
	5.1	Wajib Pajak yang diperiksa waji [a] memperlihatkan/meminjamka terkait dengan objek pajak terut: [b] memberikan keterangan lain.	3 Hari Kerja								
3.	5.2	Pemeriksaan sederhana/lengka SSPD BPHTB dibandingkan dei (basis data milik Badan Pendap transaksi), Catatan kas dan ban	7 hari kerja								
	5.3	Tim Pemeriksa melakukan Pem Pajak tidak hadir di kantor Bapei memberikan data yang diperluka terkait dengan transaksi objek pi Catatan: Pemeriksaan lapangan bisa dlak	3 hari kerja								
	5.4	Jika Wajib Pajak menolak untuk Pemeriksaan	diperiksa maka Wajib	Pajak membuat Surat Pemyataan Penolakan	1 Hari						
	5.5			diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor	3 hari kerja						
	6	Menerbitkan Surat Pemberitahua Lapangan	an Hasil Pemeriksaan	diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan	7 hari kerja						

	No	Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan	Waktu
3	7	Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	7 hari kerja
	8	Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak	
	Dalam hal Wajib F	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pombabasan Alki, W. J. P. J.	3 hari kerja
	10	tertulis Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN	3 hari kerja

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	(A)
Kepala Bidang PD I	9
HARRY DERMAWAN, SE, MM Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan	/ b
NOFRIALDY, S.IP	1

		No.		Tanggal efektif:	Oktober 2024			Halaman: 1 /	3		
-	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM		PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB BIDANG PAJAK DAERAH I								
=											
				Pelaksana				Mutu Baku			
No.	Uralan Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
1	Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak					Daftar nama Pemeriksa	1 Hari	Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP), Berita Acara Hasil Peninjauan dan Tanda Terima Surat			
2	Berkas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan kelengkapan lain dari Pelayanan Bapenda di PTSP					SPSPD BPHTB dan aplikasi penatausahaan wajib pajak		Daftar Data Pemeriksaan wajib pajak BPHTB			
3	Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak		<u> </u>			Daftar pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Surat pemanggilan wajib pajak			
4	Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan wajib pajak					Daftar pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Tanda terima surat pemanggilan wajib pajak			
5	Wajib Pajak hadir di Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH (Bapenda) Kota Batam untuk melaksanakan Pemeriksaan Kantor	Tidak n	nenolak V			Daftar Hadir dan Bukti Penelitian Berkas beserta lampiran- lampirannya	1 Hari	Berita Acara dan Dokumentasi			
5.1	Wajib Pajak yang diperiksa wajib: [a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; [b] memberikan keterangan lain.	Menolak				catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang	3 Hari Kerja	Kertas Kerja Pemeriksaan			
5.2	Pemeriksaan sederhana/lengkap dengan menilai kelengkapan pengisian, kebenaran penulisan/perhitungan SSPD BPHTB dibandingkan dengan data objek pajak yang ada pada database (basis data milik Badan Pendapatan Daerah) dengan Dokumen pendukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi.				į į	Berita Acara, Dokumentasi dan kertas kerja bemeriksaan	7 hari	Dokumen pendukung (bukti pembukuan lan bukti transaksi) Catatan kas dan bank, bukti transfer dan ain-lain			

		No. Tanggal Efektif: Oktober 2024 Halaman: 2 / 3								
-	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM		PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB BIDANG PAJAK DAERAH I							
				Pelaksana				Mutu Baku	T	
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
5.3	Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib dan Objek Pajak Pajak, jika Wajib Pajak tidak hadir di kantor Bapenda Kota Batam atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan transaksi objek pajak. Catatan: Pemeriksaan lapangan bisa dlakukan kembali Jika dikemudian hari ditemukan bukti baru.					SPT dan Bukti Tanda Terima Penyampaian	3 hari kerja	[a] Terperiksanya Kondisi riil Objek Pajak dokumen pendukung dll [b] Terkumpulkannya data dan informasi penting terkait dengan nilai transaksi Objek Pajak		
5.4	Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan					Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	1 Hari	Terbitkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	Jika Wajib Pajak menolak untuk membuat Surat Penyataan Penolakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa	
5.5	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor					Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	3 hari kerja	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
6	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan	<u></u>	<u> </u>			Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	7 hari l	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
7	Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan					Daftar Penyampaian Surat Pemberitahuan	koria C	Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak Ialam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
8	Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak					Berita Acara Laporan Hasil Pemeriksaan	3 hari kerja	aporan Hasil Pemeriksaan		
	그 보는 사람들은 살길 보다 되었다면 되었다는 때문에 살아 있는데 얼마나 없었다.									

	h	No.		Tanggal Efektif:	Oktober 2024			Halaman: 3 /	3
W	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM		PROSEDUR PEMERIKSAAN BPHTB BIDANG PAJAK DAERAH I						
				Pelaksana			Mutu Baku		
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan tertulis Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak					Laporan	3 hari kerja	Perhitungan Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
10	Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN					Hasil pemeriksaan	3 hari kerja	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	

PARAF HIERARKI
Sekretaris
M. AIDIL SAHALO, M. Eng
Kepala Bidang PD I
HARRY DERMAWAN, SE, MM
Kasubbid Penagihan dan
Pemeriksaan
NOFRIALDY, S.IP

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM KOTA BATAM

> RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 290003 1 009



JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673

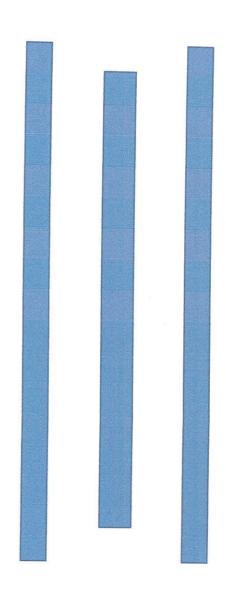
BATAM

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 BIDANG PAJAK DAERAH I

NOMOR: 5511/000.8.3.3/VI/2024



Dibuat oleh Direviu oleh	Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP
Bidang Pajak Daerah I	Bidang Pajak Daerah I	Kepala Bapenda Kota Batam



No. SOP	: \$511/000.8.3.3/V1/2024
Tanggal Pembuatan	: 04 Juni 2024
Tanggal Revisi	: 07 Oktober 2024
Tanggal Pengesahan	: (2) Oktober 2024
Disahkan oleh	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZNANSYAH NIP. 19701120 200003 1009

1	Nama SOP	Mr. 19701120 200003 1009				
	Haina SOP	:	PROSEDUR PEMERIKSAAN SEDERHANA UJI KEPATUHAN WAJIB PAJAH			
Dasar Hi	Ikum:	-	PBB-P2			
		K	ualifikasi Pelaksanan			
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		Minimal SLTA/Diploma/Strata			
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer			
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	-	Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan			
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
5	Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan					
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam					
Keterkaita	ın:	D	LL D. L.			
1	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	rer	alatan/Perlengkapan :			
2	SOP Pelaporan	2	Laporan Wajib Pajak			
3	Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi	3	Aplikasi Catatan Pajak Daerah Komputer			
Peringata	1:		Printer			
	Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-		Jaringan Internet			

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	Ch
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	P



: CT1\ / 000 . B . 3 . 3 / VI / 2024 : 04 Juni 2024 : 07 Oktober 2024 No. SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi : 01 Oktober 2024
Tanggal Pengesahan : 09 Oktober 2024
Disahkan oleh : E KEPALA BADAN PENBAPATAN DAERAH KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM Badan pendapatan daerah kota batam		RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009										
DAU			Nama SOP	DDOOCDUR DELLE								
	Dasar Huku	Dasar Hukum Pelayanan/Kegiatan										
	1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Danah										
	2	r craturali Pemerintan (PP) Nomor 35 Tahun 2022 Anna 14										
1,	3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK,07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah										
•	4	Peraturan Daerah Nomor 1 T	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Paiak Daerah dan Dakit									
	5	Peraturan Walikota Kota Bata	anun 2024 tentang Pa am Nomor 45 Tahun 2	jak Daerah dan Retribusi Daerah								
		Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan										
	6	Peraturan Walikota Batam No Badan Pendapatan Daerah K	omor 27 Tahun 2023 T	entang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas da	n Sistem Kerja di Lingkungan							
	Pihak-pihak	yang terlibat	Ota Batain		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
2.	1	Kepala Badan										
۷,	3	Sekretariat Bidang										
	4	Wajib Pajak										
	Tahapan Pe	layanan / Kegiatan										
	And the second second											
	No	Tahapan Proses Pelayanan /	Keglatan		Waktu							
	1	Surat Perintah Tugas dan	Surat Pemberitahu	Frantu								
	<u> </u>	Repada Wajib Pajak		1 hari								
		Berkas permohonan peng										
	2	permononan pembetulan/	berkas kurang bay	ar/ dokumen indikasi perbedaan Objek	Setiap hari Kerja							
		untuk dilakukan analisis re	an uengan yang tel siko dan dokumen	rdadata/ berkas Wajib Pajak yang terpilih	Oction Hall Kelja							
	3	Inventarisir Pemanggilan V	1 hari									
	4	Pengiriman surat pemange	gilan dan peninjaya	n kepada objek pajak dan wajib pajak	1 hari							
	5	Wajib Pajak hadir di Kanto untuk melaksanakan Pem	r BADAN PENDAF eriksaan Kantor	PATAN DAERAH (Bapenda) Kota Batam	1 hari							
	5.1	[a] memperlihatkan/memin atau dokumen lain terkait d	Najib Pajak yang diperiksa wajib: a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; b] memberikan keterangan lain.									
3.	5.2	Pemeriksaan sederhana/le penulisan/perhitungan SPF pada database	7 hari kerja									
		pembukuan dan bukti tran- neraca dan laporan laba ru	saksi), Catatan kas ıgi.	dengan Dokumen pendukung (bukti dan bank, utang piutang, dan persediaan,	r nan kerja							
	53	Tim Pemeriksa melakukan Pajak, jika Wajib Pajak tida pemeriksaan Kantor Wajib Tim Pemeriksa bisa Memerobjek pajak. Catatan: Pemeriksaan lapangan bisabaru.	3 hari kerja									
ŀ	5.4		untuk diperiksa ma	ika Wajib Pajak membuat Surat Pernyataar	1 hari							
	5.5	Menerbitkan Surat Pember Pemeriksaan Kantor	itahuan Hasil Peme	eriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk	3 hari kerja							
	6		itahuan Hasil Peme	riksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk	7 hari kerja							

1	No	Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan	Waktu
	7	Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	7 hari kerja
3	8	Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Parahah	
		Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat menyampalkan tanggapan tertulis Pajak yang tertuli	3 hari kerja
	9	Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak	3 hari kerja
	10	Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan STPD PBB-P2	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	4

- 1			7		7					100 miles - 100 mi
1		BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM	No.		Tanggal efektif:	Oktober 2024			Halaman: 1 /	3
	-	BADAN PENDAPATAN DAERAH KUTA BATAM			PROSEDUR	PEMERIKSAAN E	SEDERHANA UJI I BIDANG PAJAK DA	KEPATUH ERAH I	IAN WAJIB PAJAK PBB-P2	
					Pelaksana		T		Mutu Baku	
	No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataar dan Pendaftaran Pajak Daerah I		Waktu	Output	Kete-rangan
	4	Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak					Daftar nama Pemeriksa	1 Hari	Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP), Berita Acara Hasil Peninjauan dan Tanda Terima Surat	3
	2	Berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran (kompensasi)/ berkas permohonan pembetulan/ berkas kurang bayar/ dokumen indikasi perbedaan Objek Pajak pada kondisi lapangan dengan yang terdadata/ berkas Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan analisis 'esiko dan dokumen pendukung lainnya					Berita Acara, Dokumentasi dan kertas kerja pemeriksaan	Setiap Hari Kerja	Daftar Data Pemeriksaan wajib pajak PBB-P2	
	3 1	nventarisir Pemanggilan Wajib pajak					Daftar pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Surat pemanggilan wajib pajak	
	4 F	Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan vajib pajak					Daftar pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Tanda terima surat pemanggilan wajib pajak	
	5 V	Vajib Pajak hadir di Kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH Bapenda) Kota Batam untuk melaksanakan Pemeriksaan Kantor	Tidak r	nenolak			Daftar Hadir dan Bukti Penelitian Berkas beserta lampiran- lampirannya		Berita Acara dan Dokumentasi	
5	.1 d	asar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; o] memberikan keterangan lain.	Menolak				Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak erutang	3 Hari Kerja	Kertas Kerja Pemeriksaan	
5.	2 pe	emeriksaan sederhana/lengkap dengan menilai kelengkapan engisian, kebenaran penulisan/perhitungan SPPT PBB-P2 bandingkan dengan data objek pajak yang ada pada database pasis data milik Badan Pendapatan Daerah) dengan Dokumen endukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan ank, utang piutang, dan persediaan, peraca dan laporan laba rugi				E k	Berita Acara, Dokumentasi dan ertas kerja emeriksaan	7 hari	Dokumen pendukung (bukti pembukuan lan bukti transaksi) Catatan kas dan bank, bukti transfer dan aln-lain	

				7					100 CONTROL 100 CO
		No.		Tanggal Efektif:	Oktober 2024			Halaman: 2 /	3
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM			PROSEDUR	PEMERIKSAAN S B	SEDERHANA UJI K IDANG PAJAK DAE	EPATUH RAH I	AN WAJIB PAJAK PBB-P2	
				Pelaksana				Mutu Baku	
No	Grain Prosecut	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete-rangan
5.3	Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib dan Objek Pajak Pajak, jika Wajib Pajak tidak hadir di kantor Bapenda Kota Batam atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan transaksi objek pajak. Catatan: Pemeriksaan lapangan bisa dlakukan kembali Jika dikemudian hari ditemukan bukti baru.					SPT dan Bukti Tanda Terima Penyampaian	3 hari kerja	[a] Terperiksanya Kondisi riil Objek Pajak , dokumen pendukung dll [b] Terkumpulkannya data dan informasi penting terkait dengan nilai transaksi Objek Pajak	
5.4	Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan					Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	1 Hari	Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	Jika Wajib Pajak menolak untuk membuat Surat Penyataan Penolakan Pemeriksaan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa
5.6	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor					Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	3 hari kerja	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
6	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan					Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	7 hari 1	Wajib Pajak memberikan tanggapan Lertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
7	Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan					Daftar Penyampaian Surat Pemberitahuan	korin	Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak Ialam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
8	Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak				В	erita Acara Laporan lasil Pemeriksaan	3 hari kerja	aporan Hasil Pemeriksaan	
10000							William Town		

	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM	No.		Tanggal Efektif:	Oktober 2024			Halaman: 3 /	3
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM			PROSEDUR	PEMERIKSAAN S	SEDERHANA UJI KE IDANG PAJAK DAE	PATUHA RAH I	N WAJIB PAJAK PBB-P2	
				Pelaksana			ı	Mutu Baku	
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete-rangan
	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan tertulis Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak		\	Daeranii		Laporan	3 hari kerja	Perhitungan Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	
0	Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan STPD PBB-P2					Hasil pemeriksaan	3 hari kerja	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	*

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM KOTA BATAM

> RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1 009



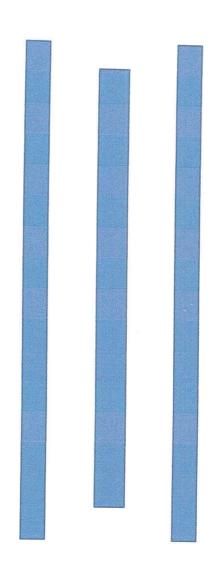
JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673 **BATAM**

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2 Pajak daerah i

NOMOR: 5512/000.8.3.3/VI/2024



Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP
Bidang Pajak Daerah I		Bidang Pajak Daerah I	Kepala Bapenda Kota Batam



No. SOP	: SS12 / 000. 8.3.3 / VI / 2029
Tanggal Pembuatan	: 04 Juni 2024
Tanggal Revisi	: 07 Oktober 2024
Tanggal Pengesahan	: ৩ỷ Oktober 2024
Disahkan oleh	2
	KEPALA BADAN PENBAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009

			NIP. 19701120 200003 1009
	Nama SOP		PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2
			PAJAK DAERAH I
Dasar Hu	kum:	110	
	Undang Undang N	Kua	lifikasi Pelaksanan
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1 1	Minimal SLTA/Diploma/Strata
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 1	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK,07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	3 h	lemiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		
(eterkaita	- in the second	Pera	latan/Perlengkapan :
1	INONITORING Pembayaran Pajak Daerah	1 L	aporan Wajib Pajak
2	SOP Pelaporan	2 A	plikasi Catatan Pajak Daerah
3	Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi	3 K	omputer
eringatan	li .		rinter
	Jika rangkaian SOP tidak dijalankan dapat mengakibatkan Potential-		aringan Internet

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	P



PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No. SOP :5512 /000 . 8 . 3 . 3 / YI / 2024 : 04 Juni 2024 Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi : 07 Oktober 2024 Tanggal Pengesahan : 09 Oktober 2024 Disahkan oleh . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009

Nama SOP PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2 BIDANG PAJAK DAERAH I

	Dasar Huku	ım Pelayanan/Kegiatan	T AGAR DAERAH I
	1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P	Inmania 6-1 . D
	2	i craturali refilefilian (PP) Nomor 35 Tahun 2022 4-4	
	3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK,07/2018 Tentang Pedoman Penagih Daerah	usi Daerah
1.		Daerah Daerah	nan dan Pemeriksaan Pajak
	4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
	5	Perkotaan	igunan Perdesaan dan
	6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas da Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	n Sistem Kerja di Lingkungan
	Pihak-pihak	yang terlibat	
-	1	Kepala Badan	
2.	2	Sekretariat	
	3	Bidang	
	4	Wajib Pajak	
	Tahapan Pe	layanan / Kegiatan	
	SAN TENNESSEE STATE OF THE SAN TENNESSEE STATE OF THE SAN TENESSEE STA		
	No	Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan	Waktu
	1	Monitoring SPPT PBB-P2 yang belum terbayarkan pada tahun berjalan.	Setiap hari kerja (setelah jatuh tempo tahun berjalan)
	2	Pengiriman Surat Pemberitahuan (SPPT-P2)	Sesuai SK distribusi SPPT
	3	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja
	4	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak daerah I dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	30 menit
3.	5	Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan pajak daerah I	30 menit
٥.	6	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari keria
	7	Jika Tidak, setelah jatuh tempo SPPT Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama	15 menit
	8	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja
	9	Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua	15 menit
	10	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja
	11	Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah I di wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa	15 menit
	12	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja
	13	Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa	10 menit

Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	4

		No.			Tanggal efekt	if:	Oktober 2024				1/2
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM				p	ROSEDU	IR PENAGIHA	N PBB-P2	·	Halan	nan: 1/2
-			PAJAK DAERAH I								
				Pelak	sana				Mutu Baku		T
No	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Sub Bio Penila Penetapan, dan Kebe Pajak Da	ian, Validasi eratan	JFU Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Monitoring penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT atas SPPT PBB- P2, Keterlambatan pelaporan PPJB/atau akta atas tanah dan/atau bangunan, denda atas pelanggaran pajak							Database Pembayaran Pajak Daerah I	Setiap hari ker (setelah jatuh tempo tahun berjalan)	Laporan Pembayaran Pajak daerah I	
2	Pengiriman Surat Pemberitahuan	Ya		Tidak				Surat Pemberitahuar (SPPT PBB-P2)	Sesuai SK distribusi SPPT	Tanda Terima Surat	
3	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	*						SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak daerah I	
4	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak daerah I dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan							Laporan Hasil Pemeriksaan/STPD	30 menit	Draft Surat Ketetapan Pajak daerah I	
5	Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan pajak daerah I	SP	\rightarrow				Total	- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Pemberitahuan		Tanda Terima Surat Pemberitahuan	
6	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	↓ Ya ↓ Ya ②	Tidak							Realisasi Pajak daerah I	
7	Jika Tidak, setelah jatuh tempo SPPT Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama,	1 Ya					S	Gurat Teguran atau Gurat Peringatan	15 menit	Tanda Terima Surat Feguran/Peringat	

Surat Teguran atau Surat Peringatan Pertama

Teguran/Peringat an Pertama

			ı.
	33		н
13.0	uda	150	ı.
170			

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No.

Tanggal Efektif

PROSEDUR PENAGIHAN PBB-P2
PAJAK DAERAH I

-	T	FAJAR DACKARI I				h					
					Pelak	sana			Mutu Baku		
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub B Penagik Pemer Pajak D	ian dan iksaan	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	JFU Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran			Tidak				SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak daerah I	
9	Setelah 7 (tujuh) hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua	2		Tidak				Surat Teguran atau Surat Peringatan Kedua	15 menit	Tanda Terima Surat Teguran/Peringat an Kedua	
10	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Ya Ya						SOP Pembayaran	Setiap hari kerja		
	Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan pajak daerah I di wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa	Ya		>				Pemasangan spanduk, stiker maupun iklan di media massa	15 menit	Bukti Poto Dokumentasi Pemasangan spanduk, stiker maupun iklan di media massa	
12	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Ž			Tida	ζ		SOP Pembayaran	Setian hari keria	Realisasi Pajak daerah I	
13	Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa							Berita acara dan kelengkapan data penagihan	III menir I	Berita Acara Berah Terima	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	T
Kepala Bidang PD HARRY DERMAWAN, SE, MM	7
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	P

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Halaman: 2/2

RAJA AZMAWSYAH NIP. 19701120 200003 1 009



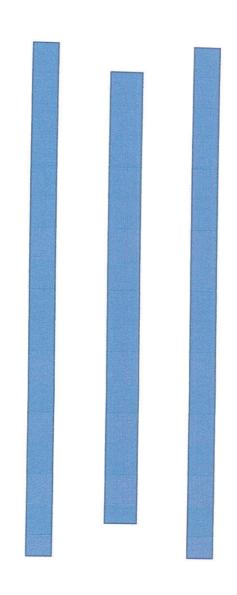
JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMKO BATAM TELP, (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673 **BATAM**

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH I

NOMOR: 5513 / 000.8.3.3 / VI / 2024



Dibuat oleh	Direviu oleh	Disetujui oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP
Bidang Pajak Daerah I		Bidang Pajak Daerah I	Kepala Bapenda Kota Batam



No. SOP	: \$513 / 000 . 8 . 3 . 3 / VI / 2024
Tanggal Pembuatan	: 04 Juni 2024
Tanggal Revisi	: 0 TOktober 2024
Tanggal Pengesahan	: 09 Oktober 2024
Disahkan oleh	

KEPALA BABAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

	SABAN PENDAPATAN DAERAH	RAJA AZMANSYAH
	Nama SOP	NIP. 19701120 200003 1009 PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK
Dasar Hu	ikum :	DAERAH I
		Kualifikasi Pelaksanan
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	1 Minimal SLTA/Diploma/Strata
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK,07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
5	Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam	
6	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	
eterkaitar	1:	
1	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Peralatan/Perlengkapan :
2	SOP Pelaporan	1 Laporan Walib Palak
3	Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan E.	2 Aplikasi Catatan Pajak Daerah
eringatan		3 Komputer
		4 Printer 5 Jaringan Internet
	DADAE INFOADIG	2

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	P



PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

No. SOP : \$513 / 000 · 8.3.3 / Y1 / 2004

Tanggal Pembuatan : 04 Juni 2024

Tanggal Revisi : 07 Oktober 2024

Tanggal Pengesahan : 09 Oktober 2024

Disahkan oleh : : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009 PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK Nama SOP

	Dagar Hul	Nama SOP : PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAG	A LISTRIK BIDANG PAJAK							
	1	relayanan/Kegiatan								
	1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kayanasa A.								
	2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P	emerintahan Daerah							
1.	3	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagik	usi Daerah							
1.5.0		Daerah Daerah	nan dan Pemeriksaan Pajak							
	4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah								
	5	Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pelek Penyelenggaraan								
	6	Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	ertentu Kota Batam n Sistem Keria di Lingkunga							
	Pihak-piha	k yang terlibat	are territorija ur Emigkunga							
	1	Kepala Badan								
2.	2	Sekretariat								
	3	Bidang								
	4	Wajib Pajak								
	Tahapan Pe	elayanan / Kegiatan								
	No	Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan	Waktu							
	1	Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan								
	2	Berkas Penelitian Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	1 Hari							
	3	Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak	Setiap Hari Kerja							
	4	Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan wajib pajak	1 Hari							
	5	Jika Wajib Pajak Tidak Dapat ditemukan/Tutup Membuat berita acara peninjauan lapangan	1 Hari							
	6	Jika Wajib Pajak tidak menolak, maka Wajib Pajak hadir	1 Hari							
	7	[a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan	1 Hari							
	8	Pemeriksaan sederhana/lengkap	7 Hari Kerja							
3.	9	Tim Pemeriksa melakukan Damarikaan I	4 hari kerja							
		Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak,	3 hari kerja							
	10	Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	1 Hari							
	12	Pemeriksa membuat Perhitungan Pajak secara Jabatan	1 Hari							
	12	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor	3 hari kerja							
	13	Lapangan	7 hari kerja							
	14	Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	7 hari kerja							
	15	Membuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib Pajak	3 hari kerja							
	16	Pajak dapat menyampaikan tanggapan tertulis Pajak	3 hari kerja							
	17	Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN	2 hari kerja							

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	an
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	\$

					a.
					9.
		ra	78		8
В,	ь,	-	w.		1
w	92		5	×	7

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Tanggal efektif:

Oktober 2024

Halaman:

1/3

PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH I

=					THOUSEN TO TENAGA LIGITAIN BIDANG PAJAN DAERAH I						
				Pelaksana			Mutu Baku				
No.	Uralan Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilalan, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
1	Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan, yang kemudian diberikan kepada Wajib Pajak					Daftar nama Pemeriksa	1 Hari	Terbit Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SPP), Berita Acara Hasil Peninjauan dan Tanda Terima Surat			
	Berkas Penelitian Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Dari Pelayanan Bapenda di PTSP/Daftar Pembayaran Pajak Daerah					SPTPD dan aplikasi penatausahaan wajib pajak	Setiap Hari Kerja	Daftar Pembinaan dan a Pemeriksaan wajib pajak			
	Inventarisir Pemanggilan Wajib pajak		Ť.			Daftar pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Surat pemanggilan wajib pajak			
	Pengiriman surat pemanggilan dan peninjauan kepada objek pajak dan wajib pajak					Daftar pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Tanda terima surat pemanggilan wajib pajak			
	Jika Wajib Pajak Tidak Dapat ditemukan/Tutup Membuat berita acara peninjauan lapangan terhadap objek pajak yang tidak aktif dan berkoordinasi dengan Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II		\	Tidak aktif		Tanda terima surat pemanggilan wajib pajak	1 Hari	Terbit berita acara Peninjauan lapangan			
	Jika Wajib Pajak tidak menolak, maka Wajib Pajak hadir di BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM Daerah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kantor	Tidak m Menolak	ienolak			Daftar Hadir dan Bukti Penelitian Berkas beserta lampiran- lampirannya		Berita Acara dan Dokumentasi			
	Wajib Pajak yang diperiksa wajib: [a] memperlihatkan/meminjamkan catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak terutang; [b] memberikan keterangan lain.					catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan atau dokumen lain terkait dengan objek pajak erutang	7 Hari Kerja	Kertas Kerja Pemeriksaan			
	Pemeriksaan sederhana/lengkap dengan membandingkan laporan Wajib Pajak (basis data milik Badan Pendapatan Daerah) dengan Dokumen pendukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi), Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi.	Ů,			k	Berita Acara, Dokumentasi dan ertas kerja ermeriksaan	4 hari kerja	- Dokumen pendukung (bukti pembukuan dan bukti transaksi) Catatan kas dan bank, utang piutang, dan persediaan, neraca dan laporan laba rugi setiap tahun selama 10 tahun			

		No.		Tanggal Efektif:	Oktober 2024			11-1 6			
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM	PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH I									
			,			THOSE EIGHT CHE	TINO I'M	JAN DAEKAH I			
				Pelaksana			M	ıtu Baku			
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II	Sub Bidang Penilalan, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan		
	Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan Lapangan terhadap Wajib Pajak, iika Wajib Pajak idak hadir di kantor BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM atau Selama pemeriksaan Kantor Wajib Pajak tidak/kurang memberikan data yang diperlukan sebagai Tim Pemeriksa bisa Memeriksa Ruang Arsip/ Server/ Aplikasi terkait dengan Pencatatan dan Pembukuan. Catatan: Pemeriksaan lapangan bisa dlakukan kembali Jika dikemudian hari ditemukan bukti baru.					SPT dan Bukti Tanda Terima Penyampaian	3 hari kerja	[a] Terperiksanya catatan keuangan, dokumen pendukung [b] Terkumpulkannya data dan informasi penting terkait dengan kewajiban pajak Wajib Pajak			
-	Jika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa maka Wajib Pajak membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan					Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan	1 Hari	Terbitkan Surat Pernyataan Pemeriksaan			
	Pemeriksa membuat Perhitungan Pajak secara Jabatan	White continues and the contin				Berita Acara dan Dokumen Perhitungan Secara Jabatan	1 Hari	Berita Acara			
F	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib ajak untuk Pemeriksaan Kantor	[k				Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	3 hari kerja	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			
F	Menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan					Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan	7 hari kerja	Wajib Pajak memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			
n d F	pabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak tidak nenyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam embahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat an menandatangi Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam embahasan Akhir Hasil Pemeriksaan					Daftar Penyampaian Surat Pemberitahuan	/ nan	Berita Acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			
P	lembuat Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dan diberitahukan kepada Wajib ajak					lerita Acara Laporan lasil Pemeriksaan	3 hari kerja	aporan Hasil Pemeriksaan.			

1	DADAN BENDADATAN DAEDAN KOTA DATAM	No.		Tanggal Efektif:	Oktober 2024			Halaman; 3	/ 3			
W.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM		PROSEDUR PEMERIKSAAN PBJT TENAGA LISTRIK BIDANG PAJAK DAERAH I									
				Pelaksana			T					
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah II	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah II	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah II	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan			
	Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir, Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan tertulis Pajak yang terutang dihitung berdasarkan hasil Pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak		7			Laporan	3 hari kerja	Perhitungan Pajak yang terutang dalam SKPD atau STPD dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan				
	Penyampaian hasil pemeriksaan ke Sub Bidang Penilaian dan Penetapan untuk diterbitkan SKPDKB atau SKPDLB atau SKPDN					Hasil pemeriksaan	2 hari kerja	Rekomendasi Hasil Pemeriksaan				

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	P

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM KOTA BATAM

> RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1 009



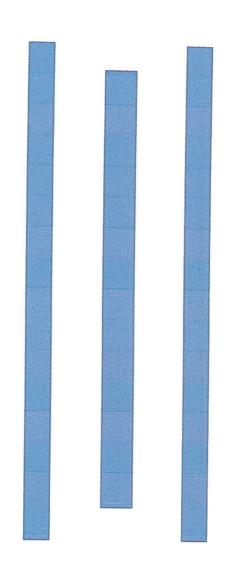
JL. Raja Isa No. 17 - KANTOR DINAS BERSAMA PEMIKO BATAM TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673 **BATAM**

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PROSEDUR PENAGIHAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH I

NOMOR: 5514 /000.8.3.3 /V1 / 2024



Dibuat oleh Direviu oleh	Disetujul oleh Pengguna SOP	Diketahui oleh Pengelola SOP
Bidang Pajak Daerah I	Bidang Pajak Daerah I	Kepala Bapenda Kota Batam



No. SOP : \$514/000. 6.3.3/V1/2034 Tanggal Pembuatan : 04 Juni 2024 Tanggal Revisi : 07 Oktober 2024 Tanggal Pengesahan : 09 Oktober 2024 Disahkan oleh :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH

			NIP. 19701120 200003 1009
	Nama SOP	:	PROSEDUR PENAGIHAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH
Dasar Hu	kum :	1.0	
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah		<u>alifikasi Pelaksanan</u> Minimal SLTA/Diploma/Strata
2	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK,07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	3	Memiliki Pengetahuan dibidang perpajakan
4	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
5	Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam		
6	Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam No.77 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		
7	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uralan Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam		
(eterkaita	n :	Dor	Note: Device street
1	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	1 1	alatan/Perlengkapan <u>:</u> .aporan Wajib Pajak
2	SOP Pelaporan	2 1	aporan wang Pajak Aplikasi Catatan Pajak Daerah
3	Instansi Vertikal yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi	3 4	Computer
eringatar			Printer
	like nemakai COD 41 L LULL L	200	aringan Internet

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	OA
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	P



PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM

Dasar Hukum Pelayanan/Kegiatan

No. SOP Tanggal Pembuatan : \$514 / 000 . 8.3.3 / \(\) 2024 : 04 Juni 2024 : U Oktober 2024 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan : 09 Oktober 2024 Disahkan oleh T: KEPALA BADAN PENDAPatan daerah kota batam

RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1009 PROSEDUR PENAGIHAN PBJT ATAS TENAGA LISTRIK PAJAK DAERAH Nama SOP

	Dagar Tiuku	m relayanan/Kegiatan									
	1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan P									
	2	Nomer 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum D. L. D.									
	3	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah									
1.	4	Daerah Penagihan dan Pemeriksaan Pajak									
1.		Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
	5	Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam									
	6	2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan	Wali Kota Batam No.77 Tahu Dewan Perwakilan Rakyat								
	7	Peraturan Walikota Batam Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas da Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	n Sistem Keria di Lingkunga								
-	Pihak-pihak	Vang terlihat									
	1	Kepala Badan									
2.	2	Sekretariat									
	3	Bidang									
	4	Wajib Pajak									
	Tahapan Pela	ayanan / Kegiatan									
	No	Tahapan Proses Pelayanan / Kegiatan	Waktu								
	1	Monitoring pernbayaran pajak daerah yang di bayarkan sendiri oleh wajib pajak.	Setiap hari kerja								
	2	Jika Setelah 20 hari kalender saat terutangnya pajak belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan	2 Jam								
	3	Pengiriman Surat Pemberitahuan									
	4	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	15 Menit								
	5	Jika Tidak membayar tetapi status wajib pajak tidak aktif maka di teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I untuk di nonaktifkan sementara	Setiap hari kerja 5 Menit								
	6	Menonaktifkan status sementara dan menginformasikan status wajib pajak untuk ditindak lanjuti, jika status wajib pajak aktif maka diteruskan kepada Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	15 Menit								
3.	7	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak Daerah I dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	15 Menit								
	8	Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan Pajak Daerah I	15 Menit								
	9	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja								
	10	Jika Tidak, setelah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama,	15 Menit								
	11	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja								
	12	Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua	15 Menit								
	13	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Setiap hari kerja								
	14	Setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan Pajak Daerah I di wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa	15 Menit								
		Fig. V. W. W. D. J. AND. 11.1									
	15	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau	Setiap hari kerja								

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	0
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S.IP	1

	BADAN PENDAPATAN	No.			Tanggal efektif:	Oktober 2	024		Halaman	: 1/2
1	DAERAH KOTA BATAM			PROSEDUR PEN	AGIHAN PBJT A	TAS TENAGA	LISTRIK PAJAK I	DAERAH I		
				Pelaksan	a			Mutu Bak	U	
No.	Uraian Prosedur	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	JFU Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete- rangan
	Monitoring pembayaran pajak daerah yang di bayarkan sendiri oleh wajib pajak.		P				Database Pembayaran Pajak Daerah I	Setiap har kerja	Pembayaran Pajak	
	Jika Setelah 20 hari kalender saat terutangnya pajak belum melakukan pembayaran maka diberikan surat pemberitahuan		Ya				Daftar Sasaran Surat Pemberitahuan Pajak Daerah I	2 Jam	Daerah I Draft Surat Pemberitahuan	
	Pengiriman Surat Pemberitahuan	†	Tidak				Surat Pemberiitahuan	15 Menit	Tanda Terima Surat	
	Jika Ya, Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	*		,			SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak Daerah I	
	Jika Tidak membayar tetapi status wajib pajak tidak aktif maka di teruskan kepada Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I untuk di nonaktifkan sementara		\(\)				Foto Dokumentasi Objek Pajak	5 Menit	Tanda Terima Penyerahan Dokumen	
	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I Menonaktifkan status sementara dan menginformasikan status wajib pajak untuk ditindak lanjuti, jika status wajib pajak aktif maka di teruskan kepada Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I						Tanda Terima Penyerahan Dokumen Foto Dokumentasi Objek Pajak	15 Menit	Daftar Status Wajib Pajak	
	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I menetapkan dan Menerbitkan SKPD Pajak Daerah I dan menyerahkan SKPD kepada Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan						Laporan Hasil Pemeriksaan/STPD		Draft Surat Ketetapan Pajak Daerah I	
	Berdasarkan SKPD Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan memberitahukan kepada Wajib Pajak tentang tunggakan Pajak Daerah I	SP Ya	Tidak				- Surat Ketetapan Pajak Daerah - Surat Pemberitahuan		Tanda Terima Surat Pemberitahuan	
9.	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	***************************************	*				OP Pembayaran		Realisasi Pajak Daerah I	1

	BADAN PENDAPATAN	No.	***************************************		Tanggal efektif:	0			Halamar	v. 2/2
-	DAERAH KOTA BATAM			PROSEDUR PEN	AGIHAN PBJT	ATAS TENAG	A LISTRIK PAJAK D	AFRAH T	Паіапа	1. 2/2
				T						
No	S. A. A. H. T. G. C. G.	Wajib Pajak	Sub Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah I	Sub Koordinator Urusan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah I	Sub Bidang Penilaian, Penetapan, Validasi dan Keberatan Pajak Daerah I	JFU Juru Sita	Kelengkapan	Waktu	Output	Kete- rangan
	Jika Tidak , setelah 7 (tujuh) Hari SKPD Di terima oleh wajib pajak dan belum melakukan pembayaran, diterbitkan Surat Teguran/Peringatan Pertama,		Tidak				Surat Teguran atau Surat Peringatan Pertama	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran/Peringat	
	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Ya 2					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	an Pertama Realisasi Pajak Daerah I	
	Setelah 7 (tujuh) Hari surat teguran/peringatan pertama tidak diindahkan di lanjutkan dengan pengiriman Surat Teguran/Peringatan Kedua	2	Tidak	-			Surat Teguran atau Surat Peringatan Kedua	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran/Peringat an Kedua	
	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	Ya Ya 💆					SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pajak Daerah I	
	setelah berakhir jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran/peringatan kedua dilakukan penindakan penagihan dengan pemasangan peringatan tunggakan Pajak Daerah I di wilayah objek pajak berupa spanduk, stiker maupun iklan di media massa	Ya	*				Pemasangan spanduk, stiker maupun iklan di media massa	15 Menit	Bukti Poto Dokumentasi Pemasangan spanduk, stiker maupun iklan di media massa	
	Jika Ya , Wajib Pajak (WP) melakukan pembayaran pajak dengan mengikuti prosedur pembayaran	8				Tidak	SOP Pembayaran		Realisasi Pajak Daerah I	
16	Jika Tidak Diserahkan Kepada JFU Juru Sita Untuk Dilanjutkan dengan Penagihan Seketika atau Sekaligus/ Penagihan Paksa						Berita acara dan Kelengkapan data Denagihan		Berita Acara Serah Terima	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris M. AIDIL SAHALO, M. Eng	a
Kepala Bidang PD I HARRY DERMAWAN, SE, MM	9
Kasubbid Penagihan dan Pemeriksaan NOFRIALDY, S,IP	7

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM KOTA BATAM

> RAJA AZMANSYAH NIP. 19701120 200003 1 009